

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pada bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diformulasikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab IV tentang kajian pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak autisme di SDIT Amalia Kabupaten Bogor. Kesimpulan di bawah ini sesuai dengan urutan butir pertanyaan pada bab sebelumnya:

1. Dukungan sistem sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak autisme di SDIT Amalia Kabupaten Bogor sudah berjalan. Kepala sekolah dan guru juga orang tua sudah memahami dan menyadari pentingnya pendidikan inklusif yang sudah dicanangkan pemerintah. Personel sekolah lengkap, yaitu Direktur (1 orang), kepala sekolah (1 orang), guru (30 orang), Tata Usaha (2 orang), penjaga sekolah (1 orang) dan tenaga kebersihan (5 orang). Jumlah guru cukup memadai karena di kelas masing-masing ada 18 sampai 22 siswa sudah termasuk ABK maksimal 2 orang. Meskipun belum mempunyai tenaga guru pembimbing khusus, namun sekolah mempunyai koordinator ABK. Dalam hal memonitor kemajuan siswa, sekolah mengambil kebijakan untuk ABK tidak mengutamakan aspek akademik terlebih dahulu, namun diutamakan pada aspek kematangan pribadi dan sosial. Dalam evaluasi sekolah membolehkan guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dan bisa dilakukan secara individual. Sekolah juga menyadari dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah masih banyak yang harus dibenahi diantaranya pengembangan staf pengajar. Pengembangan staf pengajar tersebut terkait dengan masalah pembelajaran dalam perencanaan dan penilaian hasil belajar Anak berkebutuhan khusus (ABK), dan yang penting lagi adalah masalah asesmen.

Deni Hamdani, 2013

Kajian Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Autisme di SDT Amalia Kabupaten Bogor
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Ketersediaan layanan khusus dan adaptasi lingkungan fisik dalam pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak autisme di SDIT Amalia Kabupaten Bogor belum ada. Hal ini karena pihak sekolah belum memahami layanan khusus untuk ABK (Autisme). Meskipun demikian sekolah berupaya untuk menghilangkan atau mengatasi permasalahan ABK diantaranya dengan adanya penambahan waktu dalam tugas atau jika ada penilaian, juga memperhatikan kebutuhan utama ABK di sekolah dengan memberikan pendidikan pada masalah kematangan pribadi dan sosial ABK.
3. Pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif bagi anak autisme di SDIT Amalia Kabupaten Bogor pada dasarnya sudah menyentuh masalah kebutuhan belajar ABK, hal ini ditandai dengan atmosfir kelas yang ramah terhadap keberagaman dengan mengutamakan pembedaan ahlak. Selain itu dalam pembelajaran sudah ada kerjasama dengan guru lain dan orang tua dalam menangani ABK. Namun demikian pembelajaran dalam seting pendidikan inklusif pengelolaannya masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengakomodir gambaran perencanaan pembelajaran untuk ABK termasuk didalamnya tentang penilaian untuk ABK. RPP dibuat berdasarkan kurikulum tahun 2006 atau KTSP namun tidak ada perencanaan khusus terkait keberadaan ABK dikelas seperti Program Perencanaan Individual (PPI).
4. Kolaborasi sekolah dengan *stakeholder* dalam seting pendidikan inklusif di SDIT Amalia baik kolaborasi di dalam maupun di luar SDIT Amalia menunjukkan bahwa SDIT Amalia telah melakukan pendekatan tim untuk memecahkan masalah-masalah dan implementasi program sekolah hal ini

bisa dilihat dari adanya rapat koordinasi guru dalam tiap minggunya yaitu setiap hari Kamis. Guru –guru juga dipersilahkan untuk berkonsultasi baik dengan teman sejawat, pimpinan sekolah, orang tua, maupun pihak luar seperti psikolog. Namun demikian dalam kolaborasi ini belum ada kegiatan penyusunan program untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seperti penyusunan program individual (PPI) bagi ABK. Di SDIT Amalia belum ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) sehingga selama ini pembelajaran dan segala permasalahan tentang anak ditangani wali kelas dan guru pendamping dari rumah.

5. Terumuskan rancangan program implementasi pendidikan inklusif di SDIT Amalia Kabupaten Bogor yang meliputi: a) penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), b) data dan informasi mengenai PDBK, c) Desain Program pendidikan Inklusif, d) penyiapan sumber daya manusia; Kepala sekolah, guru, TU, komite dan Rekrutmen guru pembimbing khusus (GPK), e) penyiapan sumber daya fisik yang diadaftasikan untuk ABK, f) Penyiapan daya dukung; pedomaan implementasi pendidikan inklusif di sekolah, pedoman asesmen dan penilaian, pedoman layanan khusus ABK, pedoman sosialisasi dan kolaborasi sekolah, dukungan sistem sekolah penyusunan kebijakan implementasi pendidikan inklusif di sekolah, g) Indikator hasil pembelajaran, h) pembelajaran seting inklusif: penyusunan RPP yang diadaptasikan untuk ABK, Penyusunan PPI/IEP, h) monitoring dan evaluasi, i) *education for all*, ramah dan bermutu.

B. Rekomendasi

Rekomendasi kajian pelaksanaan pendidikan inklusif bagi anak autisme di SDIT Amalia Kabupaten Bogor diantaranya adalah :

Deni Hamdani, 2013

Kajian Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Autisme di SDT Amalia Kabupaten Bogor
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat), seminar atau workshop bagi guru-guru dalam rangka pengembangan staf pengajar. Pengembangan staf pengajar tersebut terkait dengan masalah pembelajaran dalam perencanaan dan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus (ABK) dan asesmen.
2. Ada program layanan khusus untuk Anak Berkebutuhan khusus (ABK) untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan khusus ABK. Selain itu perlu ada lingkungan fisik sekolah yang diadaptasikan untuk ABK yang ada di sekolah.
3. Wujud Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Program Perencanaan Individual (PPI) yang disusun setelah ada pembinaan dan kegiatan pelatihan untuk itu dari pihak terkait seperti psikolog atau dinas pendidikan.
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan kabupaten/kota dalam rekrutmen Guru Pembimbing Khusus (GPK) atau inisiatif sekolah dalam pengadaannya. Kemudian berkolaborasi dengan *stakeholder* seperti psikolog, pengawas sekolah kabupaten/kota, pengawas provinsi, Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
5. Wujud desain program pelaksanaan pendidikan inklusif untuk mengilustrasikan keseluruhan pelaksanaan pendidikan inklusif dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Setelah itu dilakukan uji validasi yang dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang program pendidikan inklusif.